



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022  
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

\*

\*

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

\*

\*

**JAKARTA 2022**



**LAPORAN**  
**HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI**  
**RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022**  
**KE PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**19-23 Februari 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Reses ke Provinsi Sulawesi Selatan ini dalam rangka meninjau dan menghimpun informasi terkait dengan permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Pertanian, serta Bidang Kelautan dan Perikanan. Adapun dasar hukum dari Kunjungan ini mengacu pada:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal Februari 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 12 Januari 2022.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pertanian, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan; serta
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

### **C. RUANG LINGKUP**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IV, yaitu Bidang Pertanian, Pangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.

### **D. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dengan Anggota Tim para Anggota Komisi IV DPR RI.

### **E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 19-20 Februari 2022 dan bertempat di Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

### **F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA**

1. Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, Kota Makassar.

2. PT Huandi Nickel-Alloy, Kabupaten Bantaeng.
3. Perum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar Kota Makassar.
4. PT Semen Tonasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

## II. GAMBARAN UMUM

### Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di tengah-tengah Kepulauan Indonesia yakni tepatnya di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur yang memiliki luas wilayah 46.717,48 km<sup>2</sup> dengan masing-masing luasan wilayah kabupaten/kota yang dapat dilihat pada Tabel di bawah. Tentunya dilihat secara ekonomis Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki keunggulan komparatif, dimana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran internasional, disamping itu Kota Makassar telah pula ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI).

**Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota  
Di Sulawesi Selatan Tahun 2014-2019**

Wilayah	Luas Area (km <sup>2</sup> )		
	2014	2015	2019
Kepulauan Selayar	90350.00	904.00	1357.03
Bulukumba	1154.67	1155.00	1284.63
Bantaeng	395.83	396.00	395.83
Jeneponto	903.35	903.00	706.52
Takalar	566.51	567.00	566.61
Gowa	1883.32	1883.00	1883.32
Sinjai	819.96	820.00	798.96
Maros	1619.12	1619.00	1619.12
Pangkajene dan Kepulauan	1112.29	1112.00	1132.08
Barru	1174.71	1175.00	1174.71
Bone	4559.00	4559.00	4559.00
Soppeng	1359.44	1359.00	1557.00
Wajo	2506.20	2506.00	2504.06
Sindereng Rappang	1883.25	1883.00	1883.23
Pinrang	1961.17	1961.00	1961.67

Enrekang	1786.01	1786.00	1784.93
Luwu	3000.25	3000.00	3343.97
Tana Toraja	2054.30	2054.00	1990.22
Luwu Utara	7502.68	7503.00	7502.58
Luwu Timur	6944.88	6945.00	6944.88
Toraja Utara	1151.47	1151.00	1215.55
Makassar	175.77	176.00	199.26
Parepare	99.33	99.00	99.33
Palopo	247.52	248.00	252.99
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>127708.35</b>	<b>45765.00</b>	<b>46717.48</b>

Selain memiliki keunggulan dari letak geografis tersebut, Sulawesi Selatan juga memiliki keunggulan lain dilihat dari sisi etnik budaya, dimana masyarakat Sulawesi Selatan yang terdiri dari berbagai etnik budaya memiliki nilai-nilai luhur yang diangkat dari nilai tradisional dan budaya lokal, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global.

Populasi penduduk Sulawesi Selatan tahun 2020 tercatat lebih dari 9,07 juta jiwa yang mana dalam setiap 1 kilometer persegi rata-rata dihuni sebanyak 194 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki dengan nilai rasio jenis kelamin sebesar 98,59 persen yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan di Sulawesi Selatan terdapat 98-99 penduduk laki-laki. Secara nasional, berdasarkan hasil SP2020 populasi penduduk Sulawesi Selatan menyumbang 3,36 persen dari total populasi penduduk Indonesia atau sekitar 45,61 persen dari total populasi penduduk yang mendiami Pulau Sulawesi. Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi masih menjadi wilayah dengan jumlah populasi terbanyak serta dengan tingkat kepadatan tertinggi dibandingkan dengan 23 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Kota Makassar bertambah penduduknya sekitar 85 ribu jiwa dibandingkan dengan hasil pencatatan di tahun 2010 lalu.

Setelah 10 tahun beberapa wilayah bahkan mengalami penambahan penduduk lebih dari 20 persen diantaranya Tana Toraja sebesar 27,01 persen, Palopo sebesar 24,84 persen, Luwu Timur sebesar 22,08 persen, dan Toraja Utara sebesar 20,45 persen. Jumlah Penduduk usia produktif juga masih mendominasi wilayah Sulawesi Selatan dengan persentase sebesar 68,57 persen atau

sebanyak 6,22 juta jiwa. Pada usia tersebut saat ini merupakan penduduk yang lahir pada tahun 2004-1954 atau bisa disebut dengan penduduk yang termasuk kategori generasi Z, milenial, generasi X, dan Generasi Baby Boomer. Dengan Komposisi tersebut, rasio ketergantungan penduduk Sulawesi Selatan tahun 2020 menjadi sebesar 45,84 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 45-46 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas).

Sulawesi Selatan juga menyimpan banyak potensi sumber daya alamnya, seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan lainnya yang tercatat sebagai penyumbang terbesar bagi produksi nasional bahkan dikenal dunia karena diekspor ke berbagai negara. Kondisi geografis Sulawesi Selatan memudahkan akses dan sarana transportasi melalui darat, laut dan udara, dengan lokasi yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar sebagai gerbang transportasi wilayah lain. Pengembangan ekonomi berbasis kelautan menjadi fokus utama kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Posisi Sulawesi Selatan akan memperkuat tol laut untuk konektivitas dan logistik maritim. Hal ini mencakup revitalisasi dan pembangunan armada baru kapal nasional untuk angkutan barang dan penumpang, pelabuhan, dan industri galangan kapal. Pembangunan pros maritim harus diimbangi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang wilayah pesisir ALKI, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah pesisir dan laut yang terletak di ALKI II (Selat Lombok-Selat Makassar).

### **Sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Provinsi Sulawesi Selatan**

Sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian Sulawesi Selatan dengan kontribusi sekitar 21,70 persen dari seluruh sektor ekonomi di tahun 2020. PDRB lapangan usaha pertanian mengalami kontraksi sebesar 0,83 persen karena terdampak pandemi. Berbanding lurus dengan kontribusi ekonomi, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian juga mendominasi lapangan usaha. 37,98 persen pekerja di Sulawesi Selatan di periode Februari 2021, bekerja di sektor pertanian. Diikuti sektor perdagangan 17,41 persen dan konstruksi 7,28 persen.

Berdasarkan hasil Survei KSA, realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2020 sebesar 0,98 juta hektar, atau mengalami penurunan sekitar 33,93 ribu hektar (3,36 persen) dibandingkan 2019 yang mencapai 1,01 juta hektar. Puncak panen padi pada 2020 tidak mengalami pergeseran dibanding 2019. Pada 2020, puncak panen terjadi pada bulan Agustus, yaitu mencapai 0,19 juta hektar, sementara puncak panen pada 2019 terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 0,21 juta hektar. Melihat produksi daging, sapi menjadi jenis ternak dengan produksi daging tertinggi sebesar 15.310,68 ribu kg. Produksi daging unggas untuk ayam kampung 7.449.636 ton; ayam petelur 4.572.648 ton; ayam pedaging 842.720.052 ton; dan itik 1.713.036 ton.

Produksi perikanan di provinsi Sulawesi Selatan didominasi dari perikanan tangkap. Dimana pada tahun 2019 mencapai 396.757 ton. Perikanan menjadi salah satu daya tarik masyarakat di Sulawesi Selatan yang digambarkan bahwa rumah tangga perikanan di tahun 2019 meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Dimana jumlah rumah tangga perikanan di 2019 meningkat 12.625 rumah tangga dibandingkan 2018.

Sementara untuk hasil perkebunan pada tahun 2020 di Sulawesi Selatan ialah kelapa sawit 273.712 ton, kelapa 58.497 ton, karet 1.320 ton, kopi 34.427 ton, kakao 106.582 ton, tebu 2.231 ton, dan tembakau 1.137 ton.

Nilai ekspor tahun 2020 Sulawesi Selatan tertinggi adalah komoditi ikan dan udang sebesar 137,99 juta US\$. Diikuti rumput laut dan ganggang lainnya sebesar 111,77 juta US\$ dan kakao sebesar 61,95 juta US\$. Dari sisi volume, ekspor ikan dan udang sebesar 18,40 ton, rumput laut dan ganggang sebesar 117,92 ton, kakao sebesar 16,09 ton, kopi teh dan rempah-rempah sebesar 15,35 ton, buah-buahan sebesar 13,79 ton, kayu barang dari kayu sebesar 49,23 ton, dan lak getah damar sebesar 14,36 ton.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai NTP < 100 menunjukkan petani mengalami defisit, yaitu tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding

tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. NTP Sulawesi Selatan 2019-2020 masih dibawah 100 yang berarti perlu ada penanganan mengingat petani masih mengalami defisit.

### **Kabupaten Bantaeng**

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 395,83 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk ± 178.699 jiwa. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada koordinat antara 5° 21' 13" sampai 5° 35' 26" Lintang Selatan dan 119° 51' 42" sampai 120° 05' 27" Bujur Timur.

Batas Wilayahnya :

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores

Secara administratif, Kabupaten Bantaeng terbagi atas 3 Kecamatan tepi pantai, dan 5 Kecamatan bukan pantai, dengan rincian 17 desa/kelurahan pantai dan 50 desa/kelurahan bukan pantai dan terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur kota.

Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Bantaeng menghasilkan keragaman hayati dan hewani yang dapat bernilai ekonomis. Dengan kondisi alam yang sangat cocok dengan berbagai jenis hewan dan tanaman, memberikan peluang daerah Bantaeng untuk dikembangkan menjadi sentra produksi beberapa komoditas unggulan, sehingga Bantaeng bisa menjadi sentra penghasil benih dan bibit unggul.

Beberapa komoditi yang sudah berhasil dikembangkan adalah tanaman pangan yaitu padi, jagung, talas, ubi kayu, kacang hijau dan kacang tanah. Khusus untuk tanaman talas, daerah ini akan menjadi penghasil bibit tanaman talas dan akan disuplai ke daerah lain yang membutuhkan. Sedangkan untuk tanaman sayuran yang telah dikembangkan seperti kol, kentang, wortel, labu siam, bawang merah

dan petai, menjadikan Kabupaten Bantaeng menjadi penyuplai komoditi ini di kawasan Selatan Sulawesi Selatan.

Tanaman buah-buahan yang sudah berhasil dikembangkan seperti mangga, strawberi dan apel. Pengembangan budidaya tanaman apel dan strawberi di daerah ini menjadi pemicu banyaknya wisatawan lokal yang berkunjung ke Bantaeng. Di bidang peternakan, selain ayam di daerah ini cocok dikembangkan ternak sapi, kuda dan kambing. Di bidang perkebunan iklim sebagian besar wilayah Kabupaten Bantaeng cocok untuk tanaman kakao, kapuk, kopi, cengkeh dan kelapa.

Di bidang perikanan khususnya budidaya rumput laut daerah ini berhasil merubah perekonomian masyarakat pesisir yang identik dengan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi masyarakat yang berpenghasilan memadai. Selain itu, telah dikembangkan budidaya ikan air tawar yang kedepannya Kabupaten Bantaeng akan menjadi Kabupaten produsen bibit ikan air tawar.

Keberhasilan yang telah dicapai di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan menyebabkan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Bantaeng. Demikian halnya dibidang perindustrian daerah ini berpacu dan berbenah membuka industri untuk mengolah bahan baku yang tersedia cukup banyak di daerah ini. Industri yang sudah ada antara lain industri pengalengan ikan dan industri pembuatan kue kering, kripik dengan bahan baku dari jagung dan rumput laut.

### **Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Secara geografis wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas wilayah 12.362,29 km<sup>2</sup>, luas wilayah tersebut meliputi : daratan seluas 898,29 km<sup>2</sup> dan laut 4 mil seluas 11.464 km<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut merupakan penetapan dari dua Kementerian Lembaga Negara, yaitu masing-masing: luas darat menurut Permendagri No. 66 tahun 2011 dan luas laut menurut Bakosurtanal (2011) dalam buku cakupan dan luas wilayah daerah otonom seluruh Indonesia. Dimana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan dengan 103 Kelurahan/Desa. Dengan batas

wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayahnya secara geografis terdiri atas 2 (dua) bagian utama yang membentuk kabupaten ini, yaitu :

1. Wilayah Daratan secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, dimana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah.
2. Wilayah Kepulauan Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan.

### **III. HASIL KUNJUNGAN**

#### **BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

##### **Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kota Makassar**

Pada saat kunjungan Tim Komisi IV DPR RI mendapatkan penjelasan mengenai profil, kinerja, serta capaian Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, Makassar, serta

meninjau sarana prasarana yang dimiliki. Disampaikan bahwa Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Balai Besar KIPM Makassar menjalankan empat tugas utama, yaitu:

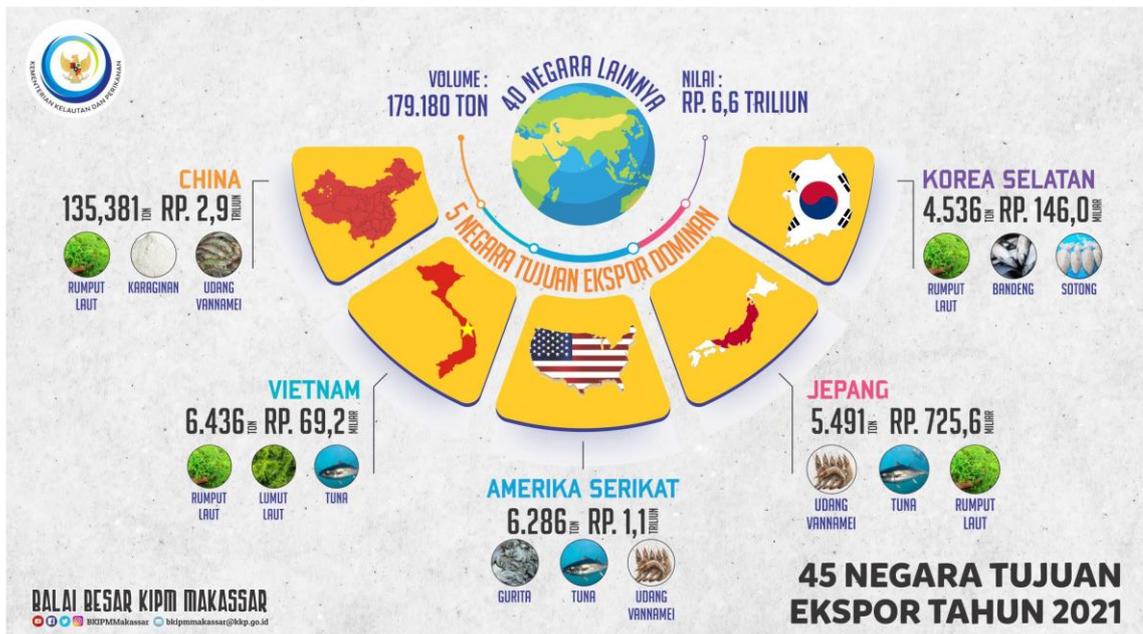
- Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina
- Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan
- Penerapan sistem manajemen mutu
- Pengawasan keamanan hayati ikan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan pengawasan lalulintas komoditi perikanan di berbagai Bandar Udara dan Pelabuhan Laut yang ada di Sulawesi Selatan.

Balai Besar KIPM Makassar mencatat total ekspor dari komoditi perikanan pada Tahun 2021 yakni sebanyak 179.180 ton atau setara dengan Rp. 6,6 Triliun. Komoditi perikanan tersebut didominasi oleh lima komoditi utama yakni rumput laut sebanyak 145.021 ton atau 80,9%, karaginan sebanyak 11.318 ton atau 6,3%, udang vannamei sebanyak 8.068 ton atau 4,5%, gurita sebanyak 3.906 ton atau 2,2%, tuna sebanyak 2.452 ton atau 1,4%, dan produk perikanan lainnya sebanyak 8.415 ton atau 4,7%. Kelima komoditi tersebut diekspor ke berbagai negara diantaranya China, Vietnam, Amerika Serikat, Jepang dan sebagainya.



## Ekspor Komoditas Perikanan Tahun 2021



Negara Tujuan Ekspor Produk Perikanan Tahun 2021

Jika dilihat dari data, secara volume ekspor produk perikanan banyak diekspor ke negara China yakni 135,381 ton dengan nilai ekspor sebesar Rp. 2,9 triliun. Produk yang diekspor meliputi rumput laut, karaginan, dan udang vannamei. Namun secara nilai ekspor, produk perikanan yang diekspor ke negara Amerika Serikat nilai ekspornya lebih tinggi yaitu sebesar 1,1 triliun dengan volume ekspor hanya sebesar 6.286 ton. Hal tersebut disebabkan produk yang diekspor ke negara Amerika Serikat adalah gurita, ikan tuna, dan udang vannamei yang memiliki nilai lebih tinggi.

Sedangkan lalu lintas impor, Balai Besar KIPM Makassar mencatat bahwa terdapat produk impor komoditi perikanan Tahun 2021 yang meliputi induk udang vannamei sebanyak 12.160 ekor yang diimpor dari Hawaii, rajungan 222 ton diimpor dari Tunisia dan 111 ton rajungan diimpor dari Bahrain.



Impor Komoditas Perikanan Tahun 2021

Selain kegiatan ekspor dan impor, Balai Besar KIPM juga mencatat data lalulintas domestik keluar dan kedalam komoditi perikanan. Pada tahun 2021 total *komoditas perikanan* yang dilalulintaskan pada kegiatan *domestik keluar* yakni sebanyak 50.499 ton atau senilai Rp. 1,8 Triliun. Komoditi yang mendominasi antara lain bandeng 40,5%, udang vannamei 21,1%, rumput laut 10,1%, gurita 5,0% dan tuna 3,4%.

Dalam rangka pencegahan sebelum dilalulintaskan maka Balai Besar KIPM Makassar juga melaksanakan kegiatan monitoring dan surveilen peta penyebaran penyakit ikan karantina, inspeksi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, serta pemantauan penyebaran jenis ikan yang bersifat invasif. Untuk menjamin komoditi perikanan tersebut bebas dari penyakit ikan karantina dan memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Balai Besar KIPM Makassar memiliki laboratorium penguji yang terakreditasi dengan berbagai ruang lingkup pengujian.

Dalam sesi dialog Plt. Kepala BKIPM menyebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 219,14 M untuk pelaksanaan program prioritas KKP di Sulawesi Selatan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah satunya adalah jumlah kantor yang tersebar jauh satu dan lainnya.

Tim Komisi IV DPR RI mengapresiasi atas capaian yang telah diraih dan meminta Balai Besar KIPM Makasar agar mempertahankan prestasinya serta terus mendorong peningkatan nilai ekspor produk perikanan Sulawesi Selatan melalui pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat mulai dari penanganan hasil perikanan hingga ekspor. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI juga mendukung pelaksanaan program prioritas KKP di Sulawesi Selatan serta terus mendorong adanya penambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk anggaran KKP di Sulawesi Selatan.

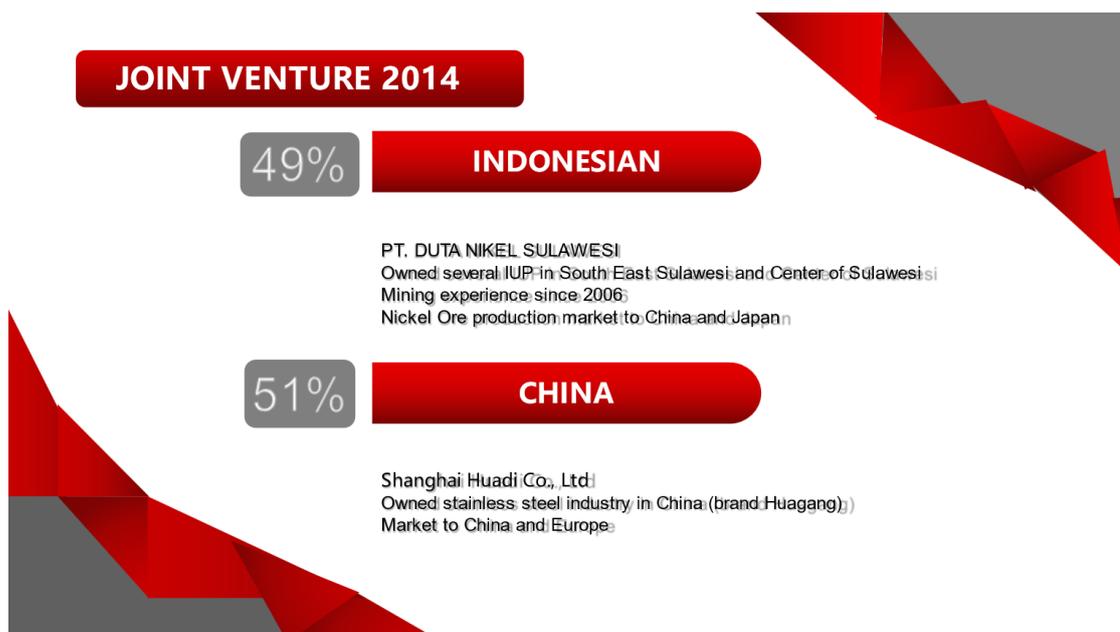
## **BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

### **PT Huadi Nickel-Alloy, Kabupaten Bantaeng**

PT HUADI NICKEL-ALLOY INDONESIA (disebut HNI) adalah perusahaan yang saat ini memulai investasinya di bidang industri pengolahan dan pemurnian mineral nikel. PT Huadi dibangun di area seluas 50 hektar yang masuk dalam area Kawasan Industri Bantaeng di Dusun Mawang, Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukkang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk sumber bahan baku nikel, PT Huadi memperoleh suplai bahan baku nikel berasal dari tambang nikel yang berada di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Kapasitas existing smelter PT Huadi sebesar 50.000 ton/tahun.

PT Huadi Nickel Alloy Indonesia adalah perusahaan *joint venture* antara Indonesia dan China. Kepemilikan 49% (empat puluh sembilan persen) saham dimiliki oleh Indonesia dan 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh China.



Dalam sesi diskusi Komisi IV menyampaikan aspirasi masyarakat terkait adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan PT HNI. Komisi IV meminta PT HNI untuk memindahkan limbah yang menumpuk tinggi agar tidak longsor ke jalan serta polusi (debu) yang berasal dari limbah perusahaan tidak mengganggu masyarakat. Selanjutnya Komisi IV juga meminta agar PT Huadi segera mengirimkan dokumen lingkungan kepada Komisi IV.

### **PT Semen Tonasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

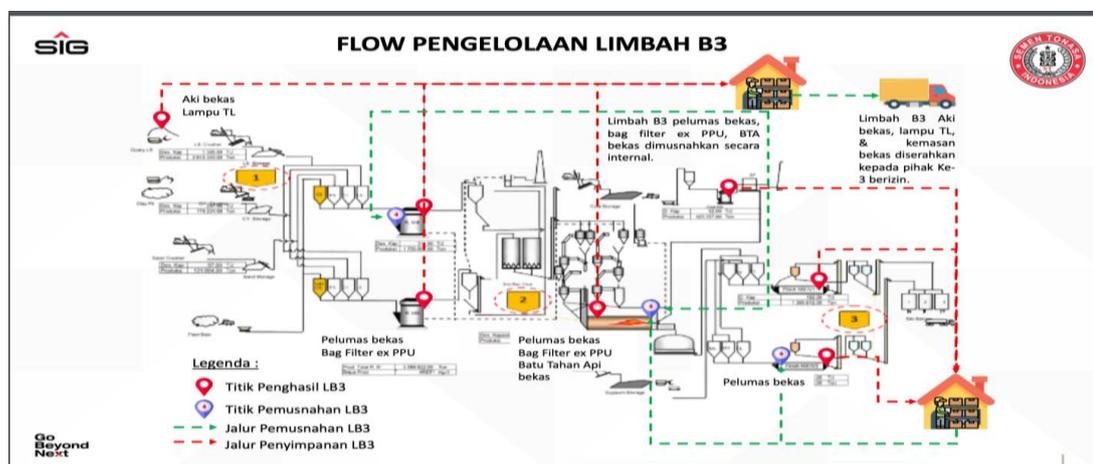
PT Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang menempati lahan seluas 1.571 hektar di Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekitar 68 kilometer dari Kota Makassar. Perseroan yang memiliki kapasitas terpasang 5.980.000 ton semen per tahun ini, mempunyai empat unit pabrik, yaitu Pabrik Tonasa II, III, IV dan V. Keempat unit pabrik tersebut menggunakan proses kering dengan kapasitas masing-masing 590.000 ton semen per tahun untuk Unit II dan III, 2.300.000 ton semen per tahun untuk unit IV serta 2.500.000 ton semen untuk unit V yang diproyeksikan mampu mensupport kebutuhan semen nasional. Didukung dengan bahan baku yang berlimpah, pabrik ini diperkirakan akan terus beroperasi dan berkontribusi pada perekonomian nasional hingga beberapa puluh tahun ke depan.

Lokasi pabrik yang berada di Sulawesi Selatan, Tonasa mengisi kebutuhan semen di daerah Indonesia Bagian Timur. Tonasa didukung oleh jaringan distribusi yang tersebar luas serta diperkuat oleh sembilan unit pengantongan semen yang melengkapi sarana distribusi penjualan. Unit pengantongan perseroan terdapat di Palu (Sulawesi Tengah), Mamuju (Sulawesi Barat), Kendari (Sulawesi Tenggara), Oba (Maluku Utara), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Sorong (Papua Barat) dengan kapasitas masing-masing 300.000 ton per tahun. Sementara untuk Unit Pengantongan Makassar (Sulawesi Selatan), Bitung (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku), dan Samarinda (Kalimantan Timur), memiliki kapasitas masing-masing 600.000 ton per tahun. Sarana pendukung operasi lainnya yang berkontribusi besar terhadap pencapaian laba perusahaan adalah utilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x25 MW dan 2x35 MW yang berlokasi di Desa Biringkassi, Kabupaten Pangkep, sekitar 17 km dari lokasi pabrik.

Dari segi pengelolaan lingkungan, Semen Tonasa menerapkan sistem manajemen berbasis sertifikasi ISO, diantaranya:

1. ISO 9001: 2015 mengenai Sistem Manajemen Mutu
2. ISO 5000: 2018 mengenai Sistem Manajemen Energi
3. ISO 45001: 2018 mengenai Sistem Manajemen K3
4. ISO 14001: 2015 mengenai Sistem Manajemen Lingkungan

Adapun Flow Pengelolaan Limbah B3 PT. Semen Tonasa adalah sebagai berikut:



Didalam sesi diskusi, selain meminta PT Semen Tonasa untuk mengelola limbah dengan baik dan menjaga agar pasir atau debu batubara tidak terbang dan mengganggu aktivitas masyarakat, Komisi IV DPR RI juga meminta kepada Perusahaan Semen Tonasa agar memastikan dana CSR tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran utamanya dalam perbaikan lingkungan.

## **BIDANG PERTANIAN**

### **Kunjungan ke Perum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar Kota Makassar.**

Tim kunjungan kerja melakukan pertemuan dan diskusi dengan Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero), Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Jenderal Hortikultura dalam rangka pemenuhan pangan dan upaya peningkatan produksi pertanian serta terkait ketersediaan pupuk bersubsidi.

Tim Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah melibatkan Bulog untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga kedelai. Artinya, Bulog tetap harus diberi peran dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan komoditas pangan. Selain itu, Tim Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk memberi penugasan kepada Bulog dapat berperan mengatasi kelangkaan minyak goreng dan kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe. Perum Bulog juga didorong untuk bekerja sama dengan PNS, serta tetap menjaga kualitas beras.

Selain itu dalam pertemuan, tim Komisi IV meminta kepada PT Pupuk Indonesia untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Kemudian meminta untuk memperbaiki sistem pengawasan antara lain melalui penerapan digitalisasi, serta meminta agar produsen pupuk tidak ragu untuk memecat distributor dan kios resmi yang terbukti melanggar.

Tim Komisi IV juga mengapresiasi kegiatan agro solution yang dicanangkan oleh PT Pupuk Indonesia dan meminta agar cakupannya diperluas dan bekerja sama dengan petani dan Eselon I teknis terkait Kementerian Pertanian. Beberapa hal juga disampaikan kepada Kementerian Pertanian, diantaranya mengapresiasi bantuan *Rice Milling Unit* (RMU) di Provinsi Sulawesi Selatan dan mengkritisi mengenai pasokan dan harga kedelai yang sangat tinggi.

Dijelaskan oleh PT Pupuk Indonesia bahwa PI akan memperkuat tenaga di lapangan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan terkait kegiatan agro solution, PT PI telah mencanangkan target sebanyak 252.000 Ha untuk tahun 2022 di seluruh Indonesia terutama di daerah sentra produksi. Terkait minyak goreng, Perum Bulog menyampaikan tidak mendapatkan penugasan, begitupula dengan CBP, Perum Bulog bergantung kepada penugasan untuk melakukan penyaluran. Dalam hal permasalahan kedelai, Direktur Jenderal Tanaman Pangan menyampaikan untuk meningkatkan produksi tidak semuanya berasal dari skema APBN namun juga dari KUR, sehingga diharapkan akan lebih banyak yang menanam.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi atas capaian yang telah diraih dan meminta Balai Besar KIPM Makassar agar mempertahankan prestasinya serta terus mendorong peningkatan nilai ekspor produk perikanan Sulawesi Selatan melalui pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat mulai dari penanganan hasil perikanan hingga ekspor.
2. Komisi IV meminta PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNI) untuk memindahkan limbah yang menumpuk tinggi agar tidak longsor ke jalan serta polusi (debu) yang berasal dari limbah perusahaan tidak mengganggu masyarakat. Selanjutnya Komisi IV juga meminta agar PT Huadi Nickel Alloy Indonesia segera mengirimkan dokumen lingkungan kepada Komisi IV sebelum pembukaan masa sidang IV.
3. Komisi IV DPR RI meminta PT Huadi Nickel Alloy Indonesia untuk segera menjalankan MoU dengan UMKM terkait kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan limbah slag sebagai bahan baku batu ringan untuk konstruksi bangunan.
4. Komisi IV DPR RI meminta PT Semen Tonasa untuk mengelola limbah dengan baik dan menjaga agar pasir atau debu batubara tidak terbang dan mengganggu aktivitas masyarakat.

5. Komisi IV DPR RI juga meminta kepada Perusahaan Semen Tonasa agar memastikan dana CSR tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran utamanya dalam perbaikan lingkungan.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (persero) dan Perum Bulog untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam rangka menjaga pasokan pangan dengan harga yang terjangkau, serta dalam upaya peningkatan produksi pertanian di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Komisi IV DPR RI meminta kepada PT Pupuk Indonesia (persero) untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas, serta berkoordinasi dengan penegak hukum jika ada agen/kios yang melakukan penyimpangan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar kegiatan agro solution diperluas cakupan kegiatannya terutama di sentra-sentra produksi padi.

## **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Sulawesi Selatan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2022

Ketua Tim,

Ttd.

**Rusdi Masse Mappasesu**  
A-398

## LAMPIRAN

### 1. Liputan Kegiatan di Media

- ✓ <https://pedomanrakyat.com/kunker-waka-komisi-iv-dpr-rusdi-masse-dan-anggota-tinjau-balai-besar-karantina-ikan-makassar/>
- ✓ <https://www.sulselsatu.com/2022/02/19/sulsel/selatan/rusdi-masse-pimpin-kunker-komisi-iv-ke-pt-huadi-di-bantaeng.html>
- ✓ <https://radarselatan.co.id/2022/02/komisi-iv-dpr-ri-reses-di-bantaeng-tinjau-pengelolaan-limbah-pt-huadi/>
- ✓ <https://rakyat.news/read/32658/komisi-iv-dpr-ri-reses-di-bantaeng-tinjau-pengelolaan-limbah-pt-huadi/>
- ✓ <https://sulsel.fajar.co.id/2022/02/19/komisi-iv-dpr-ri-reses-di-bantaeng-tinjau-pengelolaan-limbah-pt-huadi-ilham-azikin-minta-petunjuk/>
- ✓ <https://upeks.co.id/2022/02/reses-komisi-iv-dpr-tinjau-pengelolaan-limbah-pt-huadi-di-bantaeng/>
- ✓ <https://makassar.terkini.id/anggota-dpr-dukung-pemerintah-dan-pupuk-indonesia-perkuat-pengawasan-pupuk-bersubsidi-secara-digital/>
- ✓ <https://www.liputan6.com/regional/read/4894570/dukungan-dpr-ri-untuk-awasi-penyaluran-pupuk-bersubsidi-secara-digital>
- ✓ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37715/t/Komisi+IV+Tinjau+Penampungan+Batu+Bara+Semen+Tonasa>
- ✓ <https://kliksajariau.co/rusdi-masse-pimpin-kunjungan-kerja-reses-komisi-iv-dpr-ri/>
- ✓ <https://suarapemerintah.id/2022/02/komisi-iv-tinjau-penampungan-batu-bara-semen-tonasa/>

## 2. Dokumentasi Acara



# Tanggapan Kunker Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan

## 19-20 Februari 2022

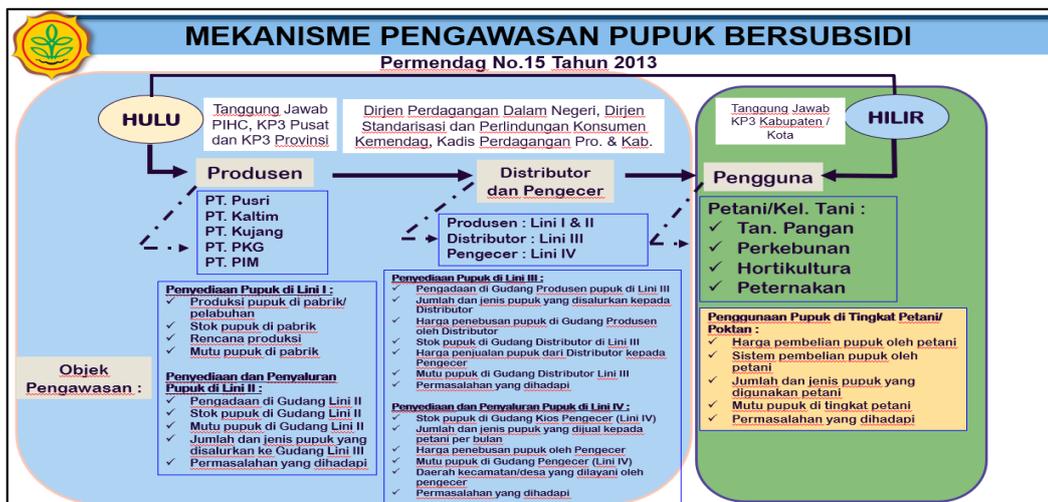
### Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

#### 1. Andi Akmal Pasluddin – F-PKS

Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi perlu diperkuat. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap distributor dan agen (pengecer)? Kalau perlu distributor dan agen yang nakal izinnya dicabut.

Tanggapan :

Mekanisme pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No.15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Adapun mekanisme pengawasan dijelaskan pada bagan di bawah ini :



#### 2. I Made Urip – F-PDIP

Saat ini alokasi pupuk bersubsidi masih belum bisa memenuhi kebutuhan petani di dalam e-RDKK. Di sisi lain, data e-RDKK belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Penyaluran pupuk bersubsidi masih terjadi kebocoran di luar petani sasaran. Padahal pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah.

Tanggapan:

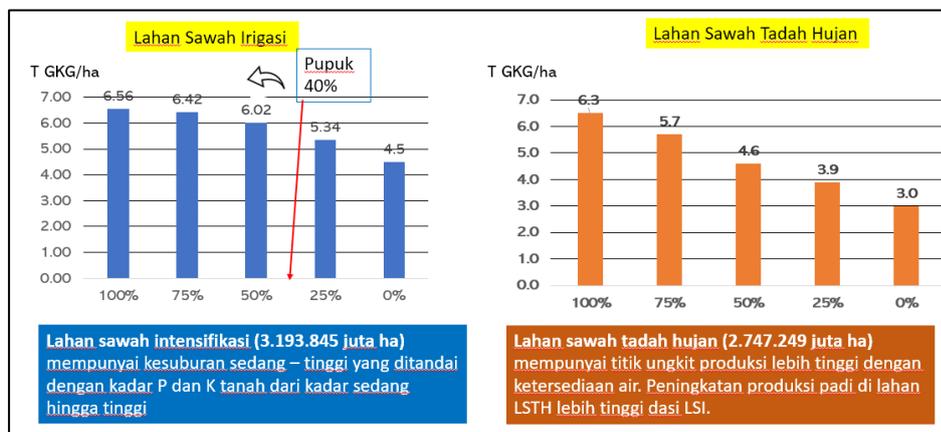
Apabila mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dijalankan dengan baik, maka kebocoran pupuk bersubsidi ke luar petani sasaran dapat diminimalisir.

### 3. Endro Hermono – F-Gerindra

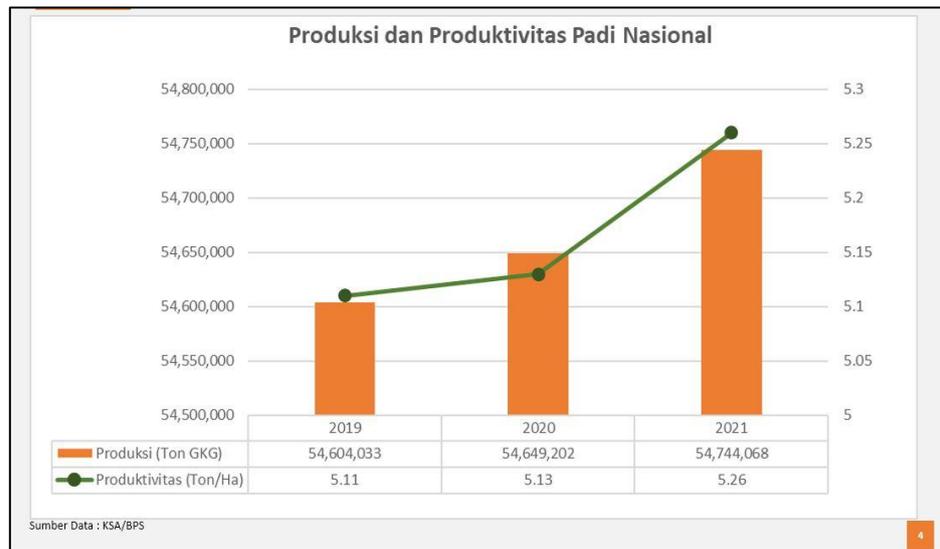
α) Apakah kalau semua usulan kebutuhan pupuk dalam e-RDKK dapat meningkatkan produksi pertanian?

Tanggapan :

- ✓ Terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi akan sejalan dengan peningkatan produksi. Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), pupuk bersubsidi berkontribusi terhadap peningkatan produksi padi sebesar 23,6%, jagung 46,2%, dan kedelai 24,5%. Bahkan penggunaan dosis Urea dan NPK sebesar 100% dosis (Urea = 200 kg/Ha dan NPK = 300 kg/Ha) dapat mendorong produksi padi sawah irigasi dan sawah tadah hujan hingga lebih dari 6 ton per ha.
- ✓ Meskipun alokasi pupuk bersubsidi masih belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pupuk berdasarkan usulan dalam sistem e-RDKK (Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok), namun dalam tiga tahun terakhir tidak terjadi penurunan produksi padi seperti yang terlihat pada



data di bawah ini. Namun yang perlu menjadi catatan, masih ada faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap produksi padi.



No	Provinsi	TAHUN								
		2019			2020			2021		
		Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	UREA	3.825.000	3.693.015	96,55	4.025.467	3.971.397	98,66	4.166.669	3.600.207	86,40
2	SP36	779.000	772.320	99,14	600.000	591.196	98,53	500.000	388.680	77,74
3	ZA	996.000	968.579	97,25	850.000	819.549	96,42	720.000	683.743	94,96
4	NPK	2.326.000	2.308.718	99,26	2.688.000	2.681.266	99,75	2.724.000	2.673.252	98,14
5	NPK FORMULA KHUSUS	-	-	-	17.000	8.982	52,84	17.000	13.909	81,82
6	ORGANIK GRANUL	948.000	741.628	78,23	720.000	648.450	90,06	649.178	515.463	79,40
7	ORGANIK CAIR*	-	-	-	-	-	-	500.000	213.685	42,74
<b>TOTAL</b>		<b>8.874.000</b>	<b>8.484.260</b>	<b>95,61</b>	<b>8.900.467</b>	<b>8.720.839</b>	<b>97,98</b>	<b>8.776.847</b>	<b>7.875.253</b>	<b>89,73</b>

β) Kelangkaan pupuk kerap menjadi persoalan selama bertahun-tahun. Bagaimana solusi kedepan untuk mengatasi kelangkaan pupuk?

Tanggapan:

Terkait kelangkaan, untuk ketersediaan pupuk dapat dipantau dari data stok, baik di tingkat produsen, distributor, maupun pengecer. Perlu disikapi penyebab dari kelangkaan tersebut karena ada sejumlah pihak yang

menyebut adanya kelangkaan namun setelah ditelusuri merupakan petani yang tidak terdaftar di dalam e-RDKK, atau pihak lain yang tidak berhak mendapat pupuk bersubsidi. Saat ini, harusnya tidak terjadi kelangkaan karena ketersediaan alokasi pupuk bersubsidi masih banyak. Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan pupuk bersubsidi, maka dapat dilakukan realokasi antar waktu dan tempat. Realokasi dapat dilakukan antar wilayah kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi.

## **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**

### **Menjawab Pertanyaan Pak Made Urip**

Historis kedelai 1974 hingga 1997 kebijakan impor tunggal oleh Bulog dengan bea masuk 30% dan ada kebijakan HPP kedelai dan diimplementasikan. Pada 1992 produksi tertinggi dan tidak impor. Seiring liberalisasi dan Lol IMF maka importasi bebas masuk dan bea masuk semakin menurun, sehingga tidak kompetitif, petani untung tipis dan lebih untung tanam jagung.

Kini kedelai lebih dari 90% dipenuhi dari Impor dengan pola non lartas dan tidak kena pajak sehingga mempengaruhi minat petani tanam kedelai. Kementerian Pertanian tidak memberikan rekomendasi impor kedelai. Untuk Impor kedelai segar tahu tempe tahun 2021 sampai bulan Desember sebesar 2.489.769 ton dan produksi dalam negeri 2021 sebanyak 200.000 ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri 2.981.880.

Akibat pandemi Covid-19, harga kedelai lokal naik yang semula Rp6.500/kg naik menjadi Rp8.500-9.000/kg, sedangkan kedelai impor semula Rp5.000/kg menjadi Rp 10.500–Rp11.000/kg. Hal ini menyebabkan petani ada semangat menanam kedelai, perlu persiapan benih 2-3 musim. Namun keuntungan tanam jagung lebih tinggi dibanding kedelai.

Realisasi tanam kedelai APBN 2021 seluas 144.000 ha (alokasi kedelai menurun karena refocusing 2021). Direncanakan Tahun 2022 didukung APBN sebesar 52.000 ha karena penurunan anggaran dan diharapkan tambahan tanam dengan Kerjasama investor pola kemitraan, importir, KOPTI, didukung kredit KUR sehingga bisa tanam lebih banyak lagi untuk memenuhi dalam negeri.

Diperlukan kebijakan pengendalian impor dan tata niaga kedelai impor, serta agar importir memprioritaskan beli kedelai petani dan sisanya dipenuhi dari impor didukung kebijakan HPP untuk kepastian pasar kedelai lokal.

**Menjawab saran masukan pak andi akmal:**

Terima kasih saran masukan dan siap dilaksanakan terkait RMU dan penyerapan gabah petani